



**BUPATI MAPPI  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MAPPI  
NOMOR : 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN MAPPI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAPPI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang melaksanakan kerja sama daerah, diperlukan pedoman tentang pelaksanaan kerja sama Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah dan dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu adanya kerja sama daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN MAPPI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mappi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Daerah lain adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
10. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;

12. Nota Kesepakatan adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri sebagai dasar kerja sama dan berisi mengenai urusan yang akan dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
13. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang berisi kesepakatan secara garis besar mengenai urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
14. Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat pada Perangkat Daerah yang diberi kuasa untuk dan atas nama Bupati untuk menandatangani naskah kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah;
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan naskah kerja sama daerah;

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri.

#### Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- (1) meningkatkan kerja sama dalam memecahkan permasalahan daerah;
- (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (3) mempercepat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat;
- (4) mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (5) pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.

## BAB II

### SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.
- (3)

#### Pasal 5

- (1) Objek kerja sama daerah yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan antara lain :
  - a. untuk mengatasi kondisi darurat;
  - b. untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. untuk melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

### BAB III DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

#### Bagian kesatu Dokumen Kerja Sama Daerah

#### Pasal 6

Dokumen Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan;
- b. Perjanjian Kerja Sama dan/atau
- c. Rencana Kerja

#### Bagian Kedua Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan

#### Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan; dan
  - c. objek kerja sama.
- (2) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Wakil Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan.
- (4) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Kerja.

#### Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Sama

#### Pasal 8

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat sekurang-kurangnya :
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek;

- d. ruang lingkup;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. force majeure/kondisi kahar; dan
  - j. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan kesepakatan para pihak, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

#### Bagian Keempat Rencana Kerja

##### Pasal 9

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tindak lanjut Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk mewujudkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek;
  - d. ruang lingkup;
  - e. tanggung jawab para pihak;
  - f. jangka waktu; dan
  - g. force majeure/kondisi kahar;
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani rencana kerja.

#### BAB IV JENIS KERJA SAMA DAERAH

##### Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama

##### Pasal 10

Jenis kerja sama Daerah terdiri atas kerja sama yang dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain;
- b. Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;

- c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di luar negeri; dan
- d. Pemerintah Daerah dengan Lembaga yang berkedudukan di luar negeri.

## Bagian Kedua Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah Lain

### Pasal 11

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) pemerintah daerah atau lebih yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) pemerintah daerah atau lebih yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

### Pasal 12

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perseorangan;
  - b. badan usaha berbadan hukum; dan/atau
  - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan.
- (3) KSDPK meliputi :
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan Daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa :
- a. Kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. Kerja sama pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Objek KSDPK merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

### Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri

#### Pasal 15

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri dari :
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan meliputi :
  - a. Pemerintah Daerah di luar negeri/lembaga di luar negeri yang negaranya mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. objek kerja sama merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri;
  - e. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
  - f. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikerjasamakan dapat dialihkan kepada sumber daya manusia di Indonesia;
  - g. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - h. saling melengkapi; dan
  - i. dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat;



**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi  
Pada tanggal 4 Januari 2023

**Pj. BUPATI MAPPI  
CAP/TTD  
MICHAEL ROONEY GOMAR**

diundangkan di Kepi  
pada tanggal 4 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH,  
Cap/ttd  
FERDINANDUS KAINAKAIMU**

*BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 3*



Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Inspektur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
6. A r s i p (Bagian Hukum).-

